



# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

**Tahun 2022**

**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pasaman Barat**

## KATA PENGANTAR

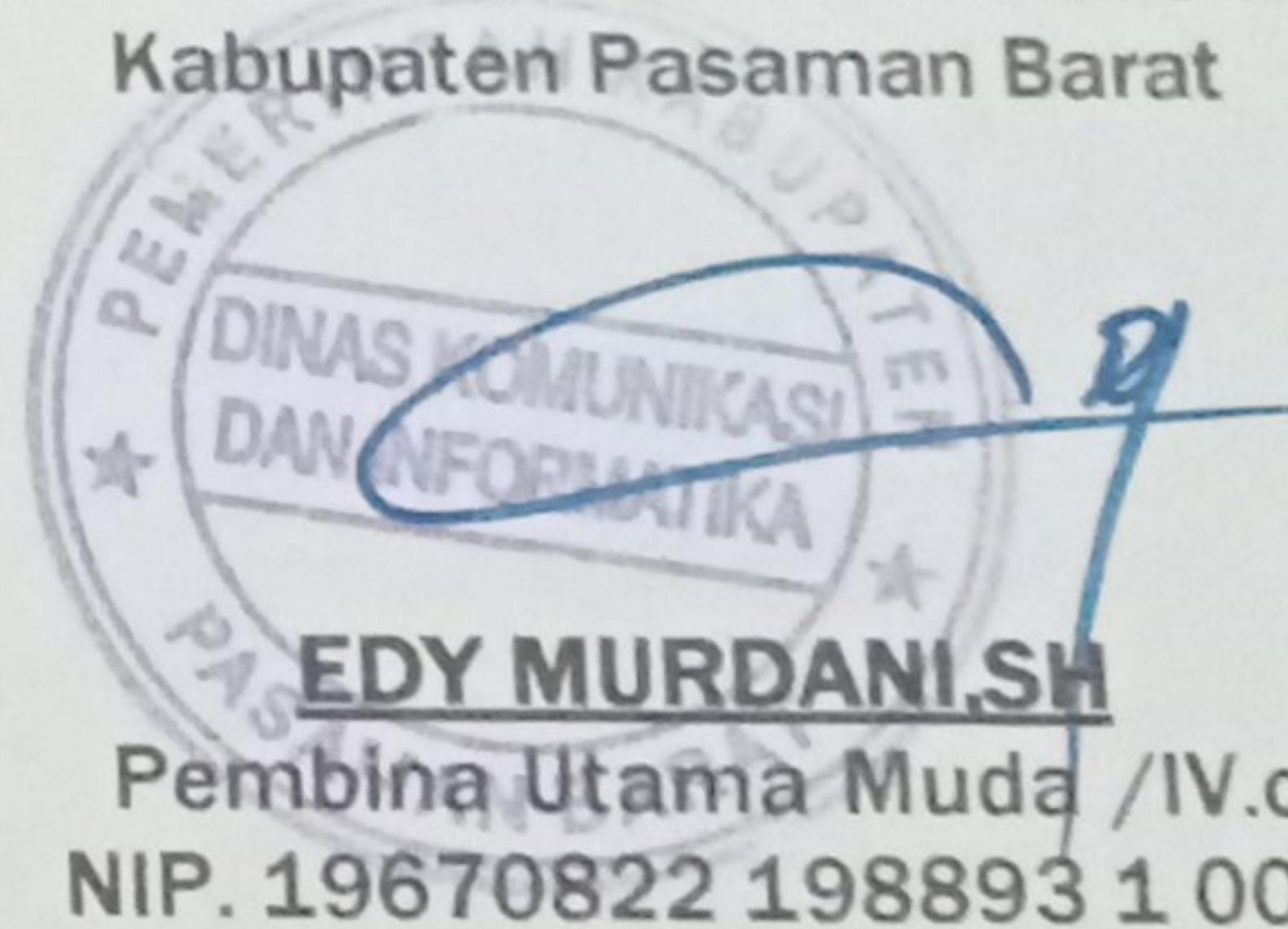
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LAPKIN ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 9 kegiatan dengan 5 program, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik. Mengenai capaian indikator kinerja kegiatan tersebut akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, Januari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pasaman Barat



## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat

## DAFTAR ISI

---

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi Instansi	4
1.5. Sumber Daya Manusia	5
1.6. Isu Strategis	6
II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	9
2.2. Tujuan Sasaran	10
2.3. Perjanjian Kinerja	11
2.4. Program Kegiatan dan Anggaran	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Target dan Realisasi Tahun 2022	15
3.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun lalu	16
3.4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra Dinas Kominfo	17
3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	18
3.6. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya	19
3.7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Atau pun Kegagalan Penetapan Pernyataan Kinerja	20
3.8. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	22
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Strategis dan pemecahan Masalah	24
Lampiran-Lampiran :	25
1. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2022	26

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yaitu **"TERSELENGGARANYA SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL, FEKTIF, EFISIEN MENUJU MASYARAKAT BERWAWASAN INFORMASI"**, dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika ;
2. Menyediakan sarana dan prasana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah ;
3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi ;
4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksebilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi ;
5. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan informasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 21 (Dua puluh satu) sub kegiatan, 11 (sebelas) kegiatan dalam 5 (Lima) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian 5 (empat) sasaran dalam 10 ( Sepuluh ) indikator kinerja (outcome/output) dan 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

# I. PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta kaporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat .

## 1.2 LANDASAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang perubahan petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

## 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika : EDY MURDANI,SH
- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika : BENDRI, S.KOM
- Kepala Bidang Layanan E- Government dan APTIKA : SUNARTO, S.Pd
- Kepala Bidang Statistik dan Persandian : AMIRI, SH
- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik : YUDHINAL REVIOLA, SE
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : ENDANG SUSANTI,SE
- Kasubag Program dan Pelaporan : ZAKIRMAN,SH
- Kasi Persandian :

• Kasi Keamanan Informasi	: SITI OLOAN HASIBUAN, SE
• Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi	:
• Kasi Kemitraan Informasi Publik	: OKTAVIANTA
• Kasi Pengelola Komunikasi Publik	: Ns.MITRA VEMILDA,M.Kep
• Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	:
• Pranata Komputer Ahli	: RETNO ASTUTI, S.KOM
• Bendahara Pengeluaran	: SANTI PRESTIKA DORA, S.ST
• Sopir	: ARNOLI

#### 1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perencanaan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan/atau
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### 1.5. SUMBER DAYA MANUSIA INSTANSI

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika keadaan pada tanggal 2 Januari 2022 adalah sebanyak 57 orang dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 53 orang dengan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 2 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
IV	3	3
III	12	11
II	5	5
I	-	-
<b>Honor dan Tenaga Kontrak</b>	<b>37</b>	<b>34</b>
<b>Daerah</b>		
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>53</b>

Latar belakang pendidikan aparatur :

Pendidikan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 2 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
S3	-	-
S2	1	-
S1	33	32
DIII	9	9
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	14	12
SLTP	-	-
SD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>53</b>

#### 1.6. Isu Strategis

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah Undang-Undang No5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan antara lain belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan OPD terkait yang selalu dinamis sesuai dengan perubahan kebijakan di tingkat pusat;
3. Masih terdapat *Missmatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta;

4. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaiannya paska pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
5. Adanya faktor eksternal lain seperti kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan penyetaraan jabatan yang kemudian merubah banyak sekali proses bisnis dan tata kerja organisasi;
6. Kebutuhan sarpras (*hardware/software*) dan infrastruktur IT untuk peningkatan digitalisasi layanan kepegawaiannya yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi;

## II. PERENCANAAN KINERJA

---

### 2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategik (Renstra) yang berorientasi pada pengeluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu ***“Terselenggaranya sistem Komunikasi dan Informatika yang Handal, Efektif, Efisien menuju masyarakat berwawasan informasi”***

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yaitu

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika ;
2. Menyediakan sarana dan prasana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah ;
3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi ;
4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksebilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi;
5. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan informasi.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) tujuan sasaranstrategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan Operasional berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan merupakan hasil Implementasi dari visi misi serta akan berfungsi menjadi indikator untuk mencapai visi dan misi tersebut. Sehingga tujuan dirumuskan guna menetapkan pencapaian misi secara spesifik, terukur,realistik, relevan dan terkait waktu perumusan tujuan.dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah misi Kabupaten Pasaman Barat.Berdasarkan hal tersebut di atas, di tetapkan 3 (Tiga) Tujuan Startegis pembangunan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang mendukung pencapaian tujuan misi kepala daerah sebagaimana Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2021- 2026.**

No	Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan Diskominfo
1	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah  2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.  2. Mewujudkan Tata Kelola pemerintah yang Efisien dan Efektif melalui sistem pemerintah berbasis elektronik  3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas

Sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ada penentuan suatu strategis yang diterapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan agar dalam proses pelaksanaan dapat lebih efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima Tahun.

### 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan perjanjian kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022 dengan Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, trasparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian Kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Eselon II DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP 2. Persentase Penurunan temuan pemeriksaan 3. Level Maturitas SPIP	B 8 2,11
2	Meningkatnya konektivitas antar instansi, layanan publik melalui layanan elektronik dan penyebarluasan tentang kebijakan dan pemerintah daerah	Indeks Maturitas SPBE 1. persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. % Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 3. Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota.	3 100 % 10% 100%
3	Meningkatnya penggunaan dan Statistik dalam pengambilan keputusan	1. OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan nilai SAKIP	85
4	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung	Indek KAMI	1

	elektronik serta komprehensif dan implementasi		
5	Meningkatkan Pelayanan aplikasi dan informatika	Indeks Masyarakat	Kepuasan 84,5 %

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022, DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp.6.250.846.067,00 yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program dengan 9 Kegiatan dan 21 sub kegiatan. Rincian lengkapnya disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan  
DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.934.974.272	
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	876.788.250	
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp.	1.708.633.500	
4.	Program Pengelolaan E-Goverment	Rp.	394.313.500	
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	30.000.000	
6.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	62.363.500	

No	Kegiatan			
1	Administrasi Keuangan	Rp	2.656.389.737,00	2.199.895.782
2	Administasi Umum Perangkat Daerah	Rp	204.249.400	204.080.260,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp	25.500.000	23.391.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp	182.306.800	177.901.100
5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.088.304.050,00	1.075.742.756
6	Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Rp	1.618.084.000,00	1.615.272.000
7	Pengelolaan E-Government	Rp	384.153.580,00	368.289.940
8	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.844.500,00	9.397.800
9	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	82.410.000,00	79.348.500

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 8.  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi K
1	$\geq 90,1$	
2	$75,1 \leq 90$	
3	$65,1 \leq 75$	
4		
5		

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan membandingkan antaratarget kinerja dengan realisasi kinerja.

Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2022 terdiri atas 5 (Lima) program yang didukung dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya.

Untuk menilai ketercapaian kinerja digunakan klasifikasi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

### 3.2 Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 merupakan rangkaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Adapun Sasaran Indikator dan Capaian Kinerja DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel. 3.2

Tabel 3.2  
Penilaian Capaian Kinerja DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)
1	Nilai Sakip	B	B	100
2	Level Maturitas SPIP	2,11	3	90
3	Persentase Penurunan temuan BPK	50	20	0,40%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh kominfo	100	100	100
5	% layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegritas	10	10	100
6	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100	100	100
7	Meningkatnya Pengguna Statistic dalam Pengambilan Keputusan	80	80	100
8	OPD yang menggunakan Data Statistik dalam penyusunan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP	85	85	100
9	Indeks KAMI	1	1	100
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	84,5	100

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 10 Indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian Kinerja DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan pada kurun waktu 2021-2026. Secara umum pada tahun 2022 indikator sasaran yang menjadi indikator teknis dari fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

1. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1 diukur melalui pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP Kabupaten Pasaman Barat oleh Kementerian PAN-RB yang dirilis pada tahun 2022. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor B/880/AA.05/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2021 adalah 62,24 (Predikat B) dengan rincian pada komponen perencanaan kinerja memperoleh skor 23,25 dari bobot 30 ( terealisasi dari target sebesar 77,50%). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja baik.
2. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2 penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,00” (nilai pada KK LEAD\_SPIP) Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisisebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	...	2,50
2.	Struktur dan Proses	...	0,840
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	...	0,93
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	...	3,370
	-MRI	...	3,10
	-IEPK	...	2,99

Dengan tingkat maturitas terdefinisi maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat :

- 1) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
- 2) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- 3) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;

- 4) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- 5) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

3. Pencapaian Sasaran 3 indikator kinerja terkait dukungan OPD terhadap Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang diukur melalui penilaian terhadap pelaksanaan SAKIP DAN SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam upaya Penurunan Persentase Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, dari penilaian tersebut bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika berada di nilai 0,40% masih terdapat temuan berupa Dokumen pendukung atas kinerja OPD. Masih diperlukan upaya yang optimal untuk keandalan penyajian laporan keuangan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana efektif dan efisien.

4. Pada Sasaran indikator kinerja ke 4 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat merupakan organisasi yang berhubungan dengan lancarnya sebuah kegiatan yang berkaitan dengan sistem jaringan, maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Sasaran Strategis untuk Meningkatkan Konektifitas antar Instansi, Layanan Publik melalui layanan elektronik dan Penyebarluaskan tentang kebijakan dan Pemerintah Daerah,Sasaran Strategis ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan E-Government. Pada Tahun 2022 Persentase OPD yang terhubung dengan Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mencapai hasil yang baik, dengan nilai target 100% untuk 42 OPD yang di Kabupaten Pasaman Barat.

5. Indikator Kinerja 5 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat memiliki Target Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi adalah 10 %, meskipun capaian hasil dari target 100 % namun Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara Online dan Terintegrasi masih perlu di efektifkan karena masih banyak layanan Publik yang belum diselenggarakan secara Online dan terintegrasi di OPD Kabupaten Pasaman Barat.

6. Pada sasaran strategis 6 indikator kinerja Masyarakat juga menjadi sasaran penyebaran informasi publik, kebijakan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik. Sasaran Strategis ini diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki aspek komunikasi dan juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan Informasi Publik. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informasi mendorong masyarakat untuk meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan Pemerintah dengan melalui berbagai media.
7. Indikator Kinerja 7 merupakan terwujudnya satu data Indonesia di Kabupaten Pasaman Barat sumber sasaran ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Tolak ukur Indikator Kinerja di peroleh dari data yang dikumpulkan dari OPD Kabupaten Pasaman Barat, menyimpan, menganalisis, dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada Pimpinan untuk pengambilan keputusan.
8. Indikator Kinerja 8 data yang di peroleh dari OPD yang ada di Kabupaten Pasaman Barat masih belum efisien karena data yang di diperoleh dari OPD terkait belum lengkap, maka OPD yang menggunakan data Statistik masih kurang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2022. Target Kinerja yang di peroleh sebesar 85% dengan capaian 100% meskipun demikian data yang dibutuhkan belum terpenuhi sesuai Sasaran Strategis.
9. Indikator Kinerja 9 Pembangunan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian. Tolak Ukur dalam melaksanakan Sasaran Strategis Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antara perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
10. Pada indikator kinerja 10 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan program pemerintah daerah dalam pengolahan komunikasi publik melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Tolak Ukur Sasaran Strategis lembaga profesi komunikasi dan informasi masyarakat, lembaga komunikasi dan informasi pemerintah, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka pengembangan Bidang usaha yang berbasis teknologi Informatik

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Dalam rangka melihat adanya kinerja yang telah dilakukan, maka perlu membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, ada atau tidak progres capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam perencanaan jangka menengah (Resntra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat. Pada Tahun 2022 Capaian Kinerja mengalami Peningkatan dari tahun 2021 seperti tabel yang di tetapkan.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO)**  
**Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2022**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD (Tahun)		Realisasi Capaian (Tahun)		Rasio Capaian (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Nilai Sakip	B	B	B	B	100	100
2	Level Maturitas SPIP	3	3	1,98	2,11	100	100
3	Persentase Penurunan temuan BPK	10	8	50	20	0,40%	0,40%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh kominfo	100	100	100	100	100	100
5	% layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegritas	5	10	5	10	100	100
6	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100	100	100	100	100	100

7	Meningkatnya Pengguna Statistic dalam Pengambilan Keputusan	80	80	80	80	100	100
8	OPD yang menggunakan Data Statistik dalam penyusunan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP	85	85	85	85	100	100
9	Indeks KAMI	1	1	1	1	100	100
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	84,5	84,5	84,5	100	100

Berdasarkan tabel diatas, target dinaikan dari tahun sebelumnya agar ada peningkatan kinerja yang harus di capai. Rincian gambaran tabel diatas adalah sebagai berikut :

### 1. Sasaran 1 : Nilai Sakip

Pada tahun 2021 Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Target B Menapatkan rasio capaian 100%, sedangkan pada tahun 2022 masih berada pada target B dengan rasio capaian 100% , dapat di lihat bahwa target capaian Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mengalami penurun atau pun peningkatan , meskipun rasio capaian 100% namun masih banyak perbaikan kinerja yang harus di penuhi.

### 2. Sasaran 2 : Persentase Temuan BPK

Pada tahun 2021 target untuk memenuhi persentase temuan BPK adalah 10 dengan rasio 50% rasio persentase temuan BPK tersebut mengalami peningkatan .pada tahun 2022 rasio persentase temuan BPK mengalami penurunan 20 % , meskipun mengalami penurunan masih di perlukan pendampingan dan perhatian yang interatif dalam penyusunan dokumen perencanaanya.

### 3. Sasaran 3 : Level Maturitas SPIP

Pada tahun 2021 target Level Maturitas SPIP adalah 3 dengan Rasio Capaian 1,98, Rasio yang di peroleh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika belum memenuhi capaian kinerja ,meskipun belum memenuhi capaian kinerja Level Maturitas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Dengan tingkat maturitas terdefinisi. Dan pada tahun 2022 dengan target 3 mengalami peningkatan sebesar 2,11 dengan rasio capaian 100 % , meskipun mengalami peningkatan capaian kinerja sasaran Level Maturitas SPIP masih belum di kategorikan atau belum memenuhi target capaian kinerja.

#### 3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Diskominfo

Dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan, target yang ditetapkan harus berpedoman pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah. Dalam renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan target yang harus dicapai dari tahun 2021 hingga tahun 2026. 2026 merupakan target akhir yang ingin dicapai dalam periode lima tahun.

Tabel 3.4  
Capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022 dan Target Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Target Renstra 2026
		Target	Capaian	
1	Nilai Sakip	B	B	B
2	Level Maturitas SPIP	3	3	5
3	Persentase Penurunan temuan BPK	10	8	<2,6
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh kominfo	100	100	4
5	% layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegritas	5	10	100

6	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100	100	35
7	Meningkatnya Pengguna Statistic dalam Pengambilan Keputusan	80	80	100
8	OPD yang menggunakan Data Statistik dalam penyusunan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP	85	85	100
9	Indeks KAMI	1	1	3
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	84,5	86

**3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi ini di pandang sebagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

a) Penyebab Kegagalan /Penurunan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika belum dapat menjangkau daerah Kabupaten Pasaman Barat, baik ditempat - tempat strategis terutama di Jorong/nagari terpencil.
2. Sumber Daya Manusia yang mempunyai basik pengetahuan di bidang Komunikasi dan Informatika belum mencukupi
3. Kepatuhan Masyarakat terhadap Undang-Undang Komunikasi membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan masih terbatas
5. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Komunikasi dan Informatika

b) Solusi dari permasalahan atau kendala diatas adalah:

1. Peningkatan SDM
2. Peningkatan Kerjasama dengan beberapa Instansi terkait
3. Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal
4. Melakukan Sosialisasi bersama Masyarakat terhadap Undang-Undang Komunikasi
5. Mengkondisikan Sarana dan Pelayanan untuk peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kinerja.
6. Adanya Perbaikan dalam mekanisme perencanaan terintegrasi dengan penganggaran melalui aplikasi.

### **3.5 Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya**

Efisien penggunaan sumber daya diukur dari sumber daya keuangan. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang capaian sasaran organisasi. Semakin tinggi penyerapan anggaran maka output (realisasi) kegiatan semakin tercapai, namun harus mampu meghemat anggaran tidak terjadi pemborosan. Suatu anggaran dikatakan efisien apabila tersebut dapat dihemat dan tidak ada pemborosan. Rasio efisien anggaran merupakan keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.612.759.522,00 dan Realisasi Rp. 6.250.846.067,00.

### **3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA*

1. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri 3 sub kegiatan*

i. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

- *Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp 2.46.717.669,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 2.347.172.842*

- Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

## II. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp. 145.100.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 134.900.000,- atau 92,97%
- Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

## III. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp. 100.622.526,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 76.410.000
- Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

### 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 kegiatan,

- i. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Program ini diharapkan dapat menunjang kelancaran dan peningkatan kinerja pegawai dalam mengelola administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pegawai pada khususnya.
  - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 19.713.550- dengan realisasi Rp. 9.527.800,- atau 48,33%
  - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

## 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub kegiatan :

### i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 3.890.350- dengan realisasi Rp. 1.639.000,- atau 42,13%
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

### ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 87.663.000- dengan realisasi Rp. 84.464.350,- atau 96,35%
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

### iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 292.700- dengan realisasi Rp. 292.700,- atau 100%
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

### 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 169.657.000,- dengan realisasi Rp. 167.742.300,- atau 98,87%
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

## **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
  - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.336.000,- atau 95,24% dengan realisasi fisik 100%.
  - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 63.593.870,- dan realisasi sebesar Rp. 63.488.000,- atau 99,83% dengan realisasi fisik 100 %.
  - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

**5. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
  - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 4.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.391.400,- atau 72,16% dengan realisasi fisik 100%.
  - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 52.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.675.750,- atau 99,86% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 11.674.600,- dan realisasi sebesar Rp. 10.849.600,- atau 92,93% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.500.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

**A. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

**1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**  
Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 10 sub kegiatan :

**i. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 2.435.000,- dan realisasi sebesar Rp. 895.000,- atau 36,75% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

ii. *Monitoring Opini dan Aspirasi Publik*

- **Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 0,- dan realisasisebesar Rp. 0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0 %.**
- **Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.**

iii. **Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah**

- **Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 3.053.500,- dan realisasisebesar Rp. 2.404.100,- atau 78,73% dengan realisasi fisik 100 %.**
- **Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan**

iv. **Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik**

- **Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 396.609.145,- dan realisasisebesar Rp. 373.283.900,- atau 94,12% dengan realisasi fisik 100 %.**
- **Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan**

v. **Pelayanan Informasi Publik**

- **Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 15.419.000,- dan realisasisebesar Rp. 9.000.000,- atau 58,37% dengan realisasi fisik 100 %.**
- **Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan**

vi. Layanan Hubungan Media

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 641.076.250,- dan realisasi sebesar Rp. 620.538.350,- atau 96,80% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

vii. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 9.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.850.000,- atau 61,26% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

viii. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

ix. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

- x. **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**
  - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 81.709.910,- dan realisasisebesar Rp. 77.238.400,- atau 94,53% dengan realisasi fisik 100 %.
  - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

#### *B. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA*

##### **1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari 1 sub kegiatan.

###### **i. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.822.158.380,- dan realisasisebesar Rp. 1.808.065.978,- atau 99,55% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

##### **2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

###### **i. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 113.267.000,- dan realisasisebesar Rp. 107.497.400,- atau 94,91% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

ii. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 72.987.250,- dan realisasisebesar Rp 69.461.850,- atau 95,17% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

### C. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

#### 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

##### i. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 50.411.250,- dan realisasisebesar Rp. 48.855.100,- atau 92,41% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

##### ii. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 13.960.000,- dan realisasisebesar Rp 12.000.000,- atau 85,96% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

**2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

**I. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.800.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

**3.3 REALISASI ANGGARAN**

Pada Tahun 2022, DISKOMINFO memiliki anggaran Rp. 6.250.846.067,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.755.318.138,- atau 92,02% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5
<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan Akibat bencana dan/atau Berpotensi Bencana	324.146.250	0	0
<b>Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.428.700.737	2.061.186.782	84,86
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.889.000	126.239.000	94,28
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.800.000	12.470.000	13,26
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.427.400	1.342.660	94
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.753.000	38.788.000	100
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.501.000	2.499.000	100

9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.568.000	161.458.600	100
---	--	-------------	-------------	-----

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.335.000	33.335.000	100
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.500.000	23.391.000	92

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.550.000	3.110.850	68
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.196.800	52.600.250	95
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.560.000	22.290.000	99
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.900.000	100

**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

16	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	0	0
17	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	0
18	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	0	0	0
19	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	329.434.050	327.130.006	99
20	Pelayanan Informasi Publik	0	0	0
21	Layanan Hubungan Media	548.370.000	534.285.000	97
22	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0	0	0
23	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	0	0
24	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0	0

25	Penyelenggaraan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Hubungan	208.300.000	207.227.750	99
<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>					
26	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1.606.084.000	1.603.284.000	100
<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>					
27	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		290.300.000	282.186.150	97
28	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		93.863.000	86.094.790	92
<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Kabupaten/Kota</i>					
29	Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		35.060.000	34.798.500	99
30	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		47.350.000	44.550.000	94
<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					
31	Operasionalisasi Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jaring	1.800.000	1.800.000	100
	<b>Jumlah</b>		<b>6.250.846.067</b>	<b>5.755.318.138</b>	<b>92,4</b>

## IV. P E N U T U P

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah mendukung pelaksanaan good governance untuk melaporkan capaian kinerja dan keuangan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. LKJIP sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah karena menilai rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran yang terukur serta berkelanjutan. Selain itu LKJIP juga alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Tujuan dan Sasaran strategis sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan yang diamanahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Indikator dari Indeks Profesionalitas ASN menjadi catatan untuk pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat pada tahun berikutnya. Rendahnya capaian indicator ini berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pada Tahun 2022 ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya up date data pada Sistem Informasi Kepegawaian sehingga ketersediaan data pegawai yang up to date dan dapat diakses dengan mudah guna keperluan pemenuhan pengukuran IP ASN, layanan administrasi kepegawaian dan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan belum bisa disajikan secara realtime
2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi sebagai inovasi untuk mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian
3. Masih rendahnya pencapaian manajemen pengelolaan ASN terutama penerapan system merit.
4. Penerapan system merit yang belum optimal.

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 21 Kegiatan dalam 10 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian 4 sasaran dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 10 Indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran / penilaian.
3. Belum optimalnya pencapaian target indicator kinerja sasaran disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan.

#### **4.2 Strategis dan pemecahan Masalah**

1. Mendorong Efektivitas pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menyelarasakan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dengan Tujuan dan sasaran berbasis outcome dan output kinerja dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program/kegiatan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan melalui kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan teknis yang mendukung tupoksi perencanaan.
5. Review dan evaluasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Simpang Empat, Januari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Pasaman Barat



EDY MURDANISH  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19670822 198893 1 004